Volume 10, nomor 2, tahun 2025

Biogenerasi

Jurnal Pendidikan Biologi

https://e-journal.my.id/biogenerasi

PERAN STRATEGIS PENYULUH PERIKANAN DALAM PENERBITAN KARTU ELEKTONIK PAS KECIL DI KABUPATEN SIKKA

Arlinda Nona Lanti, Erfin, Guido Roberto Jerun Parera, Universitas Nusa Nipa, Indonesia
*Corresponding author E-mail: nonaarlinda@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the important role of fisheries instructors in implementing and optimizing the issuance of these cards in Sikka Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews, direct observation and document analysis. The research results show that fisheries instructors have three main roles, namely: (1) socializing the program to fishermen, (2) assisting in the administration process of issuing Small E-Pas cards, (3) increasing the ability of fishermen to utilize karu to access government programs. However, challenges such as limited administrative literacy of fishermen and access to remote areas are still the main obstacles. This research concludes that the success of the program is highly dependent on the active role of fisheries instructors, with the need for additional support from local governments to overcome existing obstacles.

Keywords: *Fisheries Extension Officer, E-Pas Kecil, Fishermen, Sikka Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting penyuluh perikanan dalam pelaksanaan dan pengoptimalan penerbitan kartu tersebut di Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyuluh perikanan memiliki tiga peran utama, yaitu: (1) mensosialisasikan program kepada nelayan, (2) membantu proses administrasi penerbitan kartu E-Pas Kecil, (3) meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan karu untuk mengakses program pemerinah. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi administrasi nelayan dan akses ke wilayah terpencil masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada peran aktif penyuluh perikanan, dengan kebutuhan dukungan tambahan dari pemerintah daerah untuk mengatasi kenadala yang ada.

Kata Kunci: *Penyuluh Perikanan, E-Pas Kecil, Nelayan, Kabupaten Sikka.*

© 2025 Universitas Cokroaminoto palopo

Correspondence Author :
Universitas Nusa Nipa

p-ISSN 2573-5163
e-ISSN 2579-7085

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, dengan jumlah lebih dari 17.000 buah pulau, serta memiliki garis pantai sepanjang 95.181 Km^2. Luas wilayah indonesia mencapai 1.905 Km^2, sekitar dua pertiga wilayahnya merupakan lautan atau perairan (Cahyusila, 2022). Sebagai negara maritim, sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nelayan merupakan salah satu diantara yang bekerja dibidang kelautan di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar sebagai negara maritim (Fithriah, 2023).

Nelayan kecil, yang umumnya mengoperasikan kapal dengan ukuran kurang dari 7 Gross Tonage (GT), menjadi elemen utama dalam sektor perikanan tangkap di Indonesia. Namun mereka masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap dokumen legal kapal seperti Pas Kecil yang menjadi syarat penting untuk memperoleh bantuan pemerintah dan perlindungan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah melalui Kementerian perhubungan meluncurkan program penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil, sebuah dokumen kepemilikan kapal yang berbasis teknologi digital. Menurut Rahmawati (2024), E-Pas Kecil adalah tanda daftar kapal keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal 1 (Satu) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 6 GT sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SE.1/DJPL/2020. E-Pas Kecil diterbitkan oleh setiap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini di tingkat lokal sering menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kemampuan administrasi nelayan dan sulitnya akses ke wilayah pesisir yang terpencil. Sipahelut (2010) dalam Sianturi (2024), menjelaskan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan nelayan dan keluarganya menyebabkan keterbatasan dalam akses informasi dan pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas usaha perikanan mereka. Maka disini penyuluh perikanan memainkan peran vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan membutuhkan peran strategis dari penyuluh sebagai aktor dalam pembangunan masyarakat perikanan dalam peningkatan usaha perikanan (Metalisa, 2024). Tugas utama penyuluh adalah menyebarkan informasi mengenai pentingnya Kartu Elektronik Pas Kecil, memberikan pendampingan kepada nelayan dalam mengurus dokumen, serta memastikan kartu tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Sikka yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah dengan potensi perikanan yang besar, namun menghadapi tantangan geografis dan sosial dalam pelaksanaan program ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendalami peran strategis penyuluh perikanan dalam penerapan dan pengoptimalan program penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil (Munir, 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial dan peran penting aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan publik di sektor perikanan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu daerah dengan potensi perikanan besar namun menghadapi tantangan geografis dan sosial dalam implementasi program pemerintah. Penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan yang terhitung dari tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 19 Desember 2024.

Subjek penelitian meliputi penyuluh perikanan sebagai informan utama, serta nelayan dan pemerintah desa sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Menurut Allen (2015), Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran, kendala, dan strategi penyuluh, sementara observasi dilakukan untuk memantau langsung kegiatan penyuluh di lapangan. Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan program dan kebijakan pemerintah.

Data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi bertujuan menyederhanakan data yang diperoleh, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif,

tabel, atau diagram. Kesimpulan ditarik dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan penting yang mendukung tujuan penelitian (Arnanda, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyuluh

Penyuluh perikanan memiliki peran strategis dalam penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil, yang merupakan dokumen legal penting bagi nelayan kecil. Dokumen ini tidak hanya memberikan legalitas kepemilikan kapal, tetapi juga menjadi prasyarat bagi nelayan untuk mengakses berbagai program pemerintah seperti subsidi bahan bakar, asuransi nelayan, dan bantuan alat tangkap. Dalam konteks Kabupaten Sikka, peran penyuluh sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan nelayan, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul di lapangan. Menurut Yusuf (2021), Peran Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan di lapangan.

Sosialisasi Program Kartu E-Pas Kecil kepada Nelayan

Salah satu tugas utama penyuluh adalah memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai pentingnya Kartu Elektronik Pas Kecil. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Sikka pada awalnya belum menyadari manfaat legalitas kapal, sehingga penyuluh perlu memberikan edukasi secara intensif dengan pendekatan yang bersifat personal. Edukasi ini dilakukan melalui pertemuan kelompok nelayan, seperti di Desa Hoder, Desa Wairbleler, dan Desa Egon; diskusi di tingkat desa, seperti Desa Paga, Desa Mbengu dan Desa Likong Gete; serta kunjungan langsung ke rumah-rumah nelayan, seperti di Desa Nangahale. Dokumentasi Sosialisasi Program Kartu E-Pas Kecil kepada Nelayan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Sosialisasi Program Kartu E-Pas Kecil kepada Nelayan

Dalam proses edukasi, penyuluh menjelaskan manfaat Kartu E-Pas, seperti akses terhadap subsidi BBM dan perlindungan hukum. Menurut hasil wawancara dengan Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Sikka, seluruh desa pesisir yang berjumlah 66 desa telah disosialisasikan program E-pas. Menurut Asgar (2023), Dokumen Nelayan yang wajib dikantongi oleh setiap kapal perikanan sebagai prayarat dalam menerima BBM subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM tertentu, serta peraturan BPH migas No. 17 Tahun 2019 tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu yang salah satunya merupakan dokumen legalitas E-Pas kecil. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi sebagian nelayan, sehingga penyuluh harus menggunakan bahasa yang sederhana dan metode yang mudah dimengerti, seperti simulasi atau cerita praktis.

Pendampingan Proses Administrasi Penerbitan Kartu E-Pas Kecil

Pendampingan dalam proses administratif merupakan salah satu tugas penting yang dilakukan oleh penyuluh perikanan. Menurut penelitian Rangkuti (2014) dalam Syarief, *et al* (2021), petani ataupun nelayan merupakan salah satu pihak yang lemah akses terhadap sumber informasi dimana hanya mengandalkan kapasitas penyuluh untuk mendampinginya dalam mengembangkan proses belajar

inovasi perikanan, sehingga dengan pendampingan ini, bagi nelayan prosedur penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil sering dianggap kompleks karena mencakup pengisian formulir, pengumpulan dokumen seperti KTP dan bukti kepemilikan kapal, hingga tahap verifikasi data. Penyuluh berperan mendampingi nelayan di setiap langkah, memastikan dokumen yang diperlukan sudah lengkap, serta membantu mengatasi masalah teknis seperti kesalahan data atau kesulitan dalam memahami prosedur, penyuluh juga dapat memfasilitasi pengukuran kapal untuk penerbitan kartu E-Pas kecil. Data pendampingan proses administrasi penerbitan E-pas kecil di kabupaten sikka dapat dilihat pada Gambar berikut.

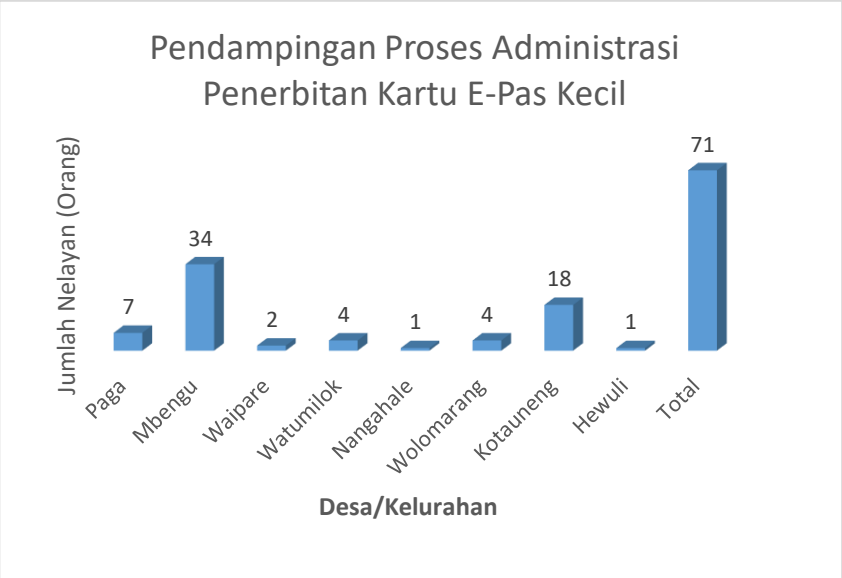

Gambar 2. Data Pendampingan Proses Administrasi Penerbitan E-pas Kecil di Kabupaten Sikka

Selama penelitian dari bulan Oktober sampai Desember 2024, tercatat ada 71 E-Pas berhasil diterbitkan yang tersebar di 5 (lima) desa dan 3 (tiga) kelurahan di Kabupaten Sikka antara lain: Desa Paga sebanyak 7 E-Pas, Desa Mbengu sebanyak 34 E-Pas, Desa Waipare sebanyak 2 E-Pas, Desa Watumilok sebanyak 4 E-Pas, Desa Nangahale sebanyak 1 E-Pas, Kelurahan Wolomarang sebanyak 4 E-Pas, Kelurahan Kota Uneng sebanyak 18 E-Pas dan Kelurahan Hewuli sebanyak 1 E-Pas. Namun, jumlah penyuluh yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya nelayan yang membutuhkan layanan menjadi kendala, sehingga proses penyelesaian administrasi sering memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Jumlah penyuluh di Kabupaten Sikka sebanyak 14 orang, dimana hal ini masih sangat minim untuk wilayah kerja yang melebihi jumlah penyuluh. Menurut (Syarief, *et al* 2021), pada saat ini kebutuhan penyuluh secara umum di Indonesia sangat diperlukan, ketenagaan penyuluh belum memenuhi kebutuhan idealnya.

Peningkatan Kemampuan dalam Memanfaatkan Kartu E-Pas Kecil

Selain membantu proses penerbitan kartu, penyuluh juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan nelayan untuk memanfaatkan kartu tersebut secara optimal. Banyak nelayan yang awalnya tidak memahami sepenuhnya manfaat dari kartu setelah berhasil diterbitkan. Oleh karena itu, penyuluh memberikan edukasi mengenai cara penggunaan kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah, seperti subsidi bahan bakar, asuransi nelayan, dan bantuan peralatan tangkap. Selain itu, penyuluh juga membantu nelayan dalam mendaftarkan kapal mereka ke sistem perikanan nasional guna memastikan mereka terdata secara resmi dan dapat menikmati manfaat jangka panjang. Data Peningkatan Pemanfaatan Kartu E-Pas Kecil Nelayan dapat di lihat pada tabel berikut.

Table 1 Peningkatan Pemanfaatan Kartu E-Pas Kecil Nelayan Peningkatan Pemanfaatan Kartu E-Pas Kecil Nelayan

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Telah Menggunakan	1.514	26,08
Belum Menggunakan	4.291	73,92
Total	5.805	100,00

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Syahbandar Pelabuhan Laurentius Say Maumere, terdapat 1.514 nelayan atau 26,08% yang telah mendapatkan kartu E-Pas Kecil, sedangkan 4.291 nelayan atau 73,92% belum mendapatkan kartu E-Pas Kecil dari total nelayan sebanyak 5.805 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wawancara nelayan belum mendapatkan kartu E-Pas Kecil walaupun telah mendapatkan sosialisasi program ini. Tantangan yang kerap muncul adalah keterbatasan fasilitas teknologi di wilayah terpencil, yang menghambat akses nelayan terhadap program berbasis elektronik.

Kendala dan Strategi Penyuluh

Penyuluh perikanan menghadapi sejumlah tantangan dalam proses penerbitan Kartu Elektronik Pas Kecil di Kabupaten Sikka. Kendala utama mencakup rendahnya kesadaran nelayan tentang pentingnya legalitas kapal, hal ini seperti kurangnya pendidikan dan partisipasi nelayan. Sebagian besar nelayan mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang potensi manfaat teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang penggunaan teknologi tersebut. keterbatasan jumlah penyuluh yang harus melayani banyak desa, sulitnya akses teknologi di wilayah terpencil, serta rendahnya tingkat partisipasi nelayan tradisional. Selain itu, hambatan administratif sering terjadi akibat kurangnya dokumen pendukung seperti KTP dan bukti kepemilikan kapal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penyuluh memperkuat sosialisasi melalui pendekatan personal dan kelompok, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk mendata nelayan serta membantu melengkapi dokumen yang diperlukan. Usulan penggunaan teknologi sederhana, seperti aplikasi berbasis *off line*, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan akses internet. Selain itu, pelatihan bagi penyuluh dan penambahan tenaga pendukung dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi program. Dengan kolaborasi berbasis komunitas dan dukungan infrastruktur dari pemerintah, diharapkan proses penerbitan kartu dapat berjalan lebih lancar dan merata.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluh perikanan memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program Kartu ElektonikPas Kecil di Kabupaten Sikka. Berdasarkan emuan penelitian, peran penyuluh perikanan terdiri dari tiga hal utama: Menssosialisasikan program kepada Nelayan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya memiliki dokumen legal kapal. Membantu Nelayan dalam proses administrasi penerbitan kartu, termasuk dalam pengumpulan dan pengisian dokumen yang diperlukan, serta pengukuran kapal dan penerbitan. Membimbing Nelayan dalam memanfaatkan kartu untuk memperoleh akses pada berbagai program pemerintah seperti bantun, subsidi, dan perlindungan hukum. Pemerintah sebaiknya meningakatkan pelatihan untuk penyuluh perikanan agar dapat lebih efektif mendampingi nelayan. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara Pemerintah, Penyuluh, Dan Nelayan agar penerbitan Kartu E-Pas Kecil dapat lebih cepat terealisasi. Sosialisasi yang terus-

menerus juga diperlukan agar nelayan memahami manfaat kartu tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi harus diperluas untuk mempermudah administrasi dan memberikan layanan yang lebih baik, khususnya di daerah terpencil. Terakhir, pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi Nelayan di Kabupaen Sikka.

DAFTAR RUJUKAN

Allen, H. F., Batubara, M. M., & Iswarini, H. I. (2015). Kendala penyuluh dalam melaksanakan aktivitas penyuluhan pada usahatani kopi di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, *4*(2), 105-110.

Arnanda, E., Salim, K., & Febrianto, A. (2021). Analisis dampak aktivitas pertambangan timah laut terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, *15*(2), 89-99.

Ayu Nirmala Lutfi Syarief, A. N. L. S., Helvi Yanfika, H. Y., Mutolib, A., & Mutolib, A. (2021). Pemahaman dan Persepsi Penyuluh Perikanan terhadap Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyuluhan di Kota Bandar Lampung. *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *9*(1), 53-62.

Fithriah, N. (2023). PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL PENANGKAP IKAN NELAYAN TRADISIONAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). *Jurnal Ilmiah Kutei*, *22*(1), 61-76.

Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*, *10*(2), 363-371.

Huri, B. D., Rahmawati, M., Purwitasari, D., & Nofandi, F. (2024). Dampak penggunaan aplikasi e-pass kecil terhadap kelancaran proses penerbitan sertifikat pas kecil di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru. *Journal Marine Inside*, 60-66.

Munir, M. (2023). Persepsi kepuasan nelayan payang terhadap pemanfaatan jasa tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, *8*(2), 81-84.

Sianturi, A. R. (2024). Analisis Faktor Penghambat Ekonomi Keluarga Nelayan Wilayah Pesisir Desa Bagan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Journal on Education, 6(4), 2. Universitas Negeri Medan.

Yusuf, M. (2021). Strategi Penyuluhan Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, *16*(2), 31-36.